

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Observasi, wawancara dan Dokumentasi maka dapat disimpulkan yakni bahwa :

- a. *Collaborative governance* dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis Sudah melakukannya dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan untuk melakukan pengelolaan mengenai ketenagakerjaan. Dan telah melakukan kegiatan kolaborasi dengan mulai tahap dialog, membangun kepercayaan, berkomitmen, berbagi pemahaman dan juga hasil yang nyata, namun sayangnya masih belum mencapai target yang diinginkan atau belum efektif atau belum maksimal proses dan hasilnya nya. Untuk mencegah terjadinya peningkatan pengangguran yang semakin tinggi kemudian pihak pemerintah pun membuat dan melaksanakan program kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat guna memperdayakan masyarakat agar memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja di Kabupaten Bengkalis.
- b. Berdasarkan pada indikator komitmen berproses. Maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bengkalis memang benar sangat berkomitmen untuk dapat mengurangi tingginya angka pengangguran yang ada di daerah dengan dapat dibuktikan bahwa adanya penurunan pada jumlah pengangguran yang ada di Kab.Bengkalis di tahun 2019-2020-2021 yaitu turun sebesar 27,4% per Tahun nya. Hal ini juga selaras dimana Dinas tenaga kerja yang memang memiliki kewajiban dan tugas untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang ada untuk peningkatan kinerja dari pengelolaan ketenagakerjaan yang ada. Kemudian adanya kejelasan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti dengan adanya papan informasi ataupun dibuat akun Instagram (media

online) dengan rincian persyaratan dan cara untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan sehingga mempermudah. Namun kegiatan tersebut kuota nya sangat terbatas dan dinilai sebagai kekurangan tersendiri.

Kabupaten Bengkalis pun juga membuat kerja sama organisasi yaitu Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk mempermudah tamatan SMK dalam hal masuk langsung ke perusahaan tempat mereka melakukan kegiatan magang dsb yang diwakilkan dari pihak sekolah ke perusahaan tanpa harus melalui Disnaker lagi, namun kegiatan organisasi ini tersendat dari tahun 2018 hingga saat ini .

- c. Adapun peran dari masing-masing *Stakeholder* yang ada di Kabupaten Bengkalis yang terkait dengan pengelolaan ketenagakerjaan ini masih berdasarkan pada tugas mereka masing-masing yang mana telah di atur UU saja, tidak lebih dari itu, sehingga kegiatan *Collaborative governance* diluar dari aturan dan juga perintah yang ada itu belum maksimal dan juga aktif dijalankan dikarenakan memang adanya beberapa kekurangan untuk dapat mengefektifkan proses-proses yang diperlukan tersebut, yaitu seperti :

- 1). Waktu turun nya anggaran yang tidak sesuai dan tidak menentu mempengaruhi jalannya kegiatan program yang akan dijalankana, misalnya jika turun nya terlambat dari pda rencana akan tidak efektif dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan program dari Disnaker, terpaksa diundur atau dibatalkan dan jika anggarannya kurang biasanya dana atau anggaran akan diletakkan kebagian lain untuk program lain, dan program mengenai ketenagakerjaan tidak efektif .
- 2). Kurangnya pegawai di dalam Kedinasan Tenaga Kerja di Kab. Bengkalis. Dimana biasanya dalam satu bidang itu terdapat 5 sampai 6 orang pegawai untuk penanggung jawab dalam bidang tersebut, namun di Kabupaten Bengkalis itu paling banyak dalam satu bidang hanya terdapat 2 pegawai saja. Kurang nya pelatihan atau pendidikan untuk pegawai juga menjadi salah tu faktor kurang efektifnya *collaborative governance* dalam pengelolaan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

5.2.Saran

Berdasarkan penelitian bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan *collaborative governance* dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan selanjutnya:

1. Agar sekiranya Bupati Kab. Bengkalis dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja Kab. Bengkalis dengan pengelolaan ketenagakerjaan. Sehingga pegawai Disnaker memiliki pengetahuan untuk mengelola Ketenagakerjaan lebih baik lagi. Serta dapat lebih memperhatikan dan juga menambah jumlah pegawai yang ada Disnaker Kab. Bengkalis.
2. Di harapkan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis atau disini khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yaitu Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi agar dapat mempertahankan upayanya dalam hal pengelolaan ketenagakerjaan dengan melalui *collaborative governance* yang ada, meningkatkan keefektifan daripada proses kegiatan tersebut, dengan menyediakan forum khusus yang dapat membahas tentang kolaborasi yang akan dibangun dan kerja sama lainnya sehingga dapat meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan ketenagakerjaan serta memperluas lagi kolaborasi yang dilakukan dengan pihak lainnya sehingga jika dapat dipertahankan dengan baik dan juga ditingkatkan lagi kinerjanya, diharapkan target pengurangan pengangguran dan juga pemberdayaan daripada SDM di Kab. Bengkalis semakin baik, efektif dan sukses.